

Eka Sulistiani (Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Bangsa) dan [ekasulistiani178@gmail.com](mailto:ekasulistiani178@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber penelitian berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan masih kurang, dengan rata-rata sebesar 15,07% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam pola hubungan instruktif dengan rata-rata sebesar 18,65% (3) Rasio Efektivitas PAD masih kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100% yaitu 93,41%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah cukup efisien dengan rata-rata sebesar 82,88%. (5) Rasio Keserasian rata-rata belanja operasi masih sangat tinggi yaitu 80,06% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 15,42% .

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian, Efektivitas PAD, Efisiensi, dan Keserasian.

### Abstract

This study aims to analyze the Financial Performance of the Regional Government of Kebumen Regency in 2017-2021. This study uses a quantitative descriptive method. The research sources come from Regional Government Financial Reports. still lacking, with an average of 15.07% (2) The Regional Financial Independency Ratio is still classified in an instructive relationship pattern with an average of 18.65% (3) The PAD Effectiveness Ratio is still less effective because the average effectiveness is below 100%, namely 93.41% (4) The Regional Financial Efficiency Ratio is quite efficient with an average of 82.88% (5) The ratio of compatibility with the average operating expenditure is still very high, namely 80.06% compared to the average capital expenditure of 15.42%

**Keywords:** Financial Performance, Fiscal Decentralization, Independence, PAD Effectiveness, Efficiency, and Harmon.

### PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan terutama berisi: (1) latar belakang; (2) rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan penelitian; (5.) manfaat penelitian. Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nanda Rahayu (2020) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Salatiga periode tahun 2017-2019 secara keseluruhan adalah baik.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021.**”

### METODE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) tempat dan waktu penelitian; (2) desain penelitian; (3) subjek dan objek penelitian; (4) definisi operasional variabel penelitian (5) teknik pengumpulan data.(6)teknik analisis data. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data

keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Objek yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari *wesite* Kabupten Kebumen berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum Kabupaten Kebumen dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2017 samapai 2021.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

**Keterangan :**

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD t = Total pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD t = Total Pendapatan Daerah tahun t

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini:

**Tabel IV. 1**  
**Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2017	443.608.862	2.713.113.397	16,35	Kurang
2018	352.047.092	2.639.814.864	13,33	Kurang
2019	409.163.433	2.818.494.983	14,51	Kurang
2020	403.025.963	2.762.987.014	14,58	Kurang
2021	472.017.087	2.832.035.015	16,59	Kurang

Sumber : LRA Kebumenkab.go.id (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dari tahun 2017-2021 dapat dikategorikan kurang. Artinya kemampuan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah kurang. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dimulai dari tahun 2017 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 16,35%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13,33%. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 14,51% dan pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 yakni sebesar 14,58%. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi Indonesia yang diserang oleh virus Covid-19. Adanya covid-19 muncul di Indonesia mengakibatkan banyak memakan korban jiwa, aktivitas masyarakat serta pemerintah Daerah menjadi terhambat dan bahkan terhenti sejenak guna menurunkan angka kematian pada masa itu. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar

16,59%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya masih dapat dikatakan kurang, karena rata-ratanya sebesar 15,07% masih berada dalam skala interval 10,00-20,00%. Hal ini diakibatkan masyarakat masih beradaptasi dalam lingkungannya yang baru saja terkena virus covid-19 dan banyaknya informasi fiktif (Hoaks) yang membuat warga masyarakat takut.

Pada rasio ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi pada PAD Kabupaten Kebumen masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih Kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD-nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi baru. Seperti memberikan pelayanan pajak dengan baik, menegaskan lagi peraturan agar kedisiplinan masyarakat meningkat dalam membayar pajak, dan membuat terobosan baru dalam sistem pembayaran pajak agar masyarakat lebih mudah dan efisien contohnya di zaman yang serba teknologi dapat membayar pajak dan pelayanan pajak melalui online tanpa harus mengantre di Kantor Pajak. Dengan adanya teknologi yang dapat mempermudah masyarakat, dapat meningkatkan pula PAD pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

**2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Kebumen dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini:

**Tabel IV. 2**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2017	443.608.862	2.264.290.535	19,59	Instruktif
2018	352.047.092	2.161.177.552	16,28	Instruktif
2019	409.163.433	2.271.833.440	18,01	Instruktif
2020	403.025.963	2.223.453.074	18,12	Instruktif
2021	472.017.087	2.222.632.960	21,23	Instruktif

Sumber : LRA-Kebumenkab.go.id (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IV.2 di atas kemampuan keuangan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk dalam pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2018 dimana nilainya sebesar 16,28% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 21,23%. Sedangkan tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2017, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar: 19,59%, 18,01%, dan 18,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

Rasio Kemandirian yang masih rendah menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

### 3) *Rasio Efektivitas PAD*

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini

**Tabel IV. 3**  
**Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**  
**Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2017	437.343.224	443.608.862	98,58	Tidak Efektif
2018	364.092.341	352.047.092	103,42	Efektif
2019	406.995.982	409.163.433	99,47	Tidak Efektif
2020	326.820.579	403.025.963	81,09	Tidak Efektif
2021	398.974.820	472.017.087	84,52	Tidak Efektif

Sumber : LRA-Kebumenkab.go.id (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel IV.3 di atas dapat dilihat bahwa Efektivitas Keuangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 tidak efektif karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 98,58%, 99,47%, 81,09%, dan 84,52%. Diketahui penyebab ketidakefektifan dari hasil di atas dikarenakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan dari tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 hasilnya masih di bawah 100%. Sebaiknya dari angka anggaran PAD yang sudah direncanakan, angka realisasi PAD tidak melebihi dari angka yang sudah dianggarkan agar hasilnya dapat efektif. Kemudian untuk tahun 2018 sudah dikatakan efektif karena nilai yang diperoleh lebih dari 100% yakni 103,42%. Hal ini dikarenakan realisasi PAD yang direncanakan dengan target anggaran yang sudah ditetapkan sudah efektif. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel IV.3 Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen masih kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu 93,41%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih kurang dari dana yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga dapat dikatakan masih kurang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun untuk dapat meningkatkan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus tetap mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

### 4) *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah*

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini :

**Tabel IV. 4**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2017	2.113.132.464	2.713.113.397	77,88	Efisien
2018	2.145.847.613	2.639.814.864	81,28	Cukup Efisien
2019	2.246.525.240	2.818.494.983	79,70	Efisien
2020	2.138.449.904	2.762.987.014	77,39	Efisien
2021	2.779.840.698	2.832.035.015	98,15	Kurang Efisien

Sumber : LRA-Kebumenkab.go.id (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel IV.4 di atas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, 2019, dan 2020 dapat dikatakan efisien karena nilai yang diperoleh pada interval 60%-80%. Kemudian pada tahun 2018 cukup efisien dikarenakan nilai yang diperoleh pada interval 80%-90%. Sedangkan pada tahun terakhir yakni tahun 2021 nilai yang diperoleh kurang efisien karena nilai yang diperoleh pada interval 90%-100% yaitu sebesar 98,15%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen yang tergolong masih kurang efisien karena rata-rata rasionya 82,88% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Meskipun pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperoleh masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

#### 5) **Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel IV.5 dan tabel IV.6 di bawah ini :

**Tabel IV. 5**  
**Perhitungan Rasio Keserasian Daerah**  
**Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017-2021**  
**(Belanja Operasi)**

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2017	2.113.132.464	1.678.033.681	79,40
2018	2.145.847.613	1.775.838.236	82,75
2019	2.246.525.240	1.880.683.876	83,71
2020	2.138.449.904	1.839.460.030	86,01
2021	2.779.840.698	1.902.638.912	68,44

Sumber : LRA-Kebumenkab.go.id (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IV.5 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 80,06%. Dimulai pada tahun 2017 dimana penggunaan anggaran lumayan banyak di alokasikan ke belanja operasi sebesar 79,40%. Pada tahun 2018 sebesar 82,75%. Kemudian pada tahun 2019 yaitu sebesar 83,71% dan pada tahun 2020 sebesar 86,01%. Selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 68,44 %.

Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS dan pegawai honor lainnya. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen kecil atau belum belum terpenuhi.

**Tabel IV.6**  
**Perhitungan Rasio Keserasian Daerah**  
**Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017-2021**  
**(Belanja Modal)**

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2017	2.113.132.464	433.698.055	20,52
2018	2.145.847.613	370.004.376	17,24
2019	2.246.525.240	365.840.794	16,28
2020	2.138.449.904	288.801.049	13,50
2021	2.779.840.698	266.110.950	9,57

Sumber : LRA-Kebumenkab.go.id (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IV.6 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021 sebesar 15,42%. Tahun 2017 diperoleh nilai sebesar

20,52%. Kemudian pada tahun 2018,2019,2020, dan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya yakni sebesar 17,24%; 16,28%;13,50%; dan 9,57%. Rasio keserasian keuangan daerah menunjukkan dana belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja modal masih lebih rendah dibandingkan untuk belanja operasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial.

### Kutipan dan Acuan

Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019). Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya (Awani dan Hariani, 2021). Rasio derajat desentralisasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Maulina dan Rhea, 2019). Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019). Pemerintah harus melaksanakan optimalisasi anggaran dalam rangka pertanggungjawaban publik yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan pemaksimalan output yang dihasilkan dengan menggunakan cara yang tepat agar program yang dirncanakan dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keefesienan dapat tercapai apabila input yang masuk digunakan dengan seminimal mungkin dan output yang dihasilkan melebihi target yang ditetapkan.

(Maharani, 2018). Keefisienan keuangan daerah dapat dilihat melalui hasil perhitungan rasio efisiensi. Sudaryono (2019) menjelaskan bahwa "Rasio efisiensi merupakan suatu rumus yang digunakan untuk menilai selisih antara total realisasi belanja yang digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut dapat tergambar dengan jelas."Efektif merupakan tingkat keberhasilan pencapaian program dari sasaran target yang ditetapkan. Secara singkat efisiensi berkaitan dengan output dan tujuan. Jadi, efisiensi dapat tercapai apabila jumlah dari hasil output dapat memenuhi target dan sasaran yang ditetapkan (Muflihani, 2018). Menurut (Hamim,2019) mendefinisikan efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. . Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Syamsul, 2020). Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nanda Rahayu (2020) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Salatiga periode tahun

2017-2019 secara keseluruhan adalah baik. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengamanan, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menjajarkan diri dalam suatu *level of playing field* (Basri F, 174: 2020).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Gentar, 2019).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi I, 2018:89)

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo,2020:121):1) Memprbaiki kinerja Pemerintah Daerah, 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3)Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai tolok ukur dalam (Halim A, 2021:230):

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim A, 2018:231). Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik (Halim A, 2018:234).

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data kesimpulan sebagai berikut : (1.) Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat

dikategorikan masih Kurang.(2.) Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali. (3.) Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari rasio Efektivitas PAD diketahui tidak efektif. (4.) Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen diketahui efisien. (5.) Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil.

## Saran

**(1.)Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal:** Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah agar derajat desentralisasi fiskal semakin meningkat. (2.) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen juga sebaiknya meningkatkan PAD dengan melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah agar tidak terlalu bergantung soal keuangan kepada pemerintah pusat dan provinsi, serta tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dapat meningkat.(3.)Rasio Efektivitas PAD: Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah terutama disektor PAD.(4.) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah: Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya dapat meminimalisir jumlah belanja daerah dengan menyesuaikan pendapatannya, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.(5.) Rasio Keserasian: Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya mampu mengutamakan kebutuhan pembangunan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik.(6.)Bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.(7.)Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). *Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.3(2), 95- 102.
- Anita Wulandari. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Basri, Faisal. (2020). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Penerbit Erlangga.

- Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni,S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Kuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 110-120.
- Gentar, (2019). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Halim,Abdul & Kusufi, M.S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamim, (2019). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat
- Harjito, Y., Nugraha,P. S., & Yulianto, Y., (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia, *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19-28.  
<https://doi.org/10.29407/jae.v5il.14061>
- Maharani, (2018).*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*.Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mailangkay,P.P.U.,Murni,S.,Rate,P.V, Kinerj,A.,& Daerah,K.(2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonmi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,8(3),278-285.  
[ttps://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29937](https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29937)
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Obis*,2(1), 11-22.
- Muflihani, (2018). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan*. Jakarta:Salemba Empat
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahn Kota Depok-Jawa Barat. *Journal IMAGE/*, 9(1), 1-19.
- Rahayu, N. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Salatiga Periode 2017-2019*. Salatiga: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Siranggih, F., & Siregar, I.A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1-14.

- Sofi, I. (2021). *Mendorog Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*.
- Sudaryono.(2019). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiani, E. 2022. Daftar Dokumen Laporan Realisasi Anggaran diakses 28 September 2022. <http://www.kebumenkab.go.id>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi-Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Syamsul . (2020). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.